

REINKARNASI POLITISI BERTABUR BINTANG PASCA REFORMASI

Andi Ali Said Akbar¹

Abstract

Although trauma and public skepticism toward the military is still quite strong; though the sins of the military during the New Order freely beragai stripped naked in public space during the reform. In fact, military figures rose even more flying in many national level either party until the local level, both old and new parties. To face the new system of political contestation and the military is benefiting from a weakening factor of the consolidation of civilian political forces. Political parties and civic leaders increasingly anti Orba number berjibun be a dilemma. Elections are approaching need fresh energy to be the winner while they are still haunted by the various limitations of the cadre of crisis, financial crisis and the crisis of political networks. To rise, the former general has a genetic modalities required political parties and civic leaders that organizational discipline, a network of territorial and political violence. Political modalities of military culture is that interest civilian politicians because it can be replicated in consolidating the power of the party, although very risky membangun consolidation of democracy in Indonesia in the future. The choices here are to be assessed for reading the direction of the democratization of Indonesia.

Key Words: *Political Parties, Politicians Crisis Civil, Military Politicians Modality, Consolidation of Democracy.*

Abstrak

Walau trauma dan skeptisme publik terhadap militer masih cukup kuat; walau dosa-dosa militer pada masa Orba dengan bebas ditelanjangi dalam berbagai ruang publik pada masa reformasi sekarang ini. Faktanya, tokoh Militer justru semakin bangkit berkibar di banyak partai baik level nasional hingga level lokal, baik partai lama maupun baru. Untuk menghadapi sistem dan kontestasi politik baru ini maka militer diuntungkan oleh faktor melemahnya konsolidasi kekuatan politik sipil. Partai politik dan tokoh sipil anti Orba jumlahnya kian berjibun berada pada posisi dilematis. Pemilu yang semakin mendekat membutuhkan energi segar untuk menjadi pemenang sementara mereka masih dihantui berbagai keterbatasan yakni krisis kader, krisis keuangan dan krisis jaringan politik. Untuk bangkit, para Mantan Jenderal memiliki modalitas politik yang genetik dibutuhkan partai politik dan tokoh sipil yakni disiplin organisasional, jaringan teritorial dan politik kekerasan. Modalitas politik kultur militer inilah yang menarik minat politisi sipil karena dapat direplikasi dalam mengkonsolidasikan kekuatan partai, walau amat riskan dalam membangun konsolidasi demokrasi Indonesia kedepan. Pilihan-pilihan inilah yang harus dikaji untuk membaca arah demokratisasi Indonesia.

Kata Kunci : Partai Politik, Krisis Politisi Sipil, Modalitas Politisi Militer, Konsolidasi Demokrasi.

¹ Dosen Ilmu Politik Fisip Unsoed

LATAR BELAKANG

Politik Indonesia kian hari kian bertabur tokoh penuh bintang. Ketika Indonesia memasuki babak baru demokratisasi pasca jatuhnya Orde Baru tahun 1998, kita menyaksikan tingginya antusiasme rakyat menjemput kebebasan ditandai tingginya partisipasi dalam pemilu tahun 1999. Disaat yang sama kita menyaksikan tingginya tingkat antipati dan kebencian politik rakyat kepada militer. Namun lain lubuk lain belalang, jika rakyat membenci maka di level elit partai baik partai bekas Orba maupun partai baru justru beramai-ramai merekrut para jenderal masuk partai politiknya. Kekuatan apa yang membuat tokoh militer begitu berharga dimata politisi ? Ada apa dengan politisi sipil pro demokrasi hari ini? Apakah mereka merasa tidak siap dan inferior berkompetisi dengan tokoh militer ataukah daya kompetisinya memang sangat ditentukan oleh jejaring tokoh berbintang tersebut?

Setidaknya gejala ini telah terlihat seiring dengan terjadinya pada tahun 2004, ketika terjadi penurunan drastis partisipasi publik dalam menyuarakan pilihan politiknya melalui partai politik.² Pemicu persoalan ini adalah kian meningkatnya kekecewaan dan ketidakpercayaan publik terhadap parpol dan para kadernya yang sejatinya menjadi pahlawan nasib rakyat malah terkesan menikam rakyat dari belakang. Dimulai dari persoalan konflik internal yang selalu mengarah pada perpecahan parpol hingga massifnya demonstrasi kegobrokan mentalitas politisi di arena negara.³ Temuan yang juga menarik adalah tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tentara bahkan melampaui tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, dan media. Terlepas dari keanekaragaman temuan tersebut, salahsatu persoalan yang hendak ditekankan disini adalah bahwa pilar-pilar demokrasi (partai politik, parlemen, kepolisian, LSM dan sistem peradilan) di negeri ini mengalami krisis kepercayaan.⁴

² Data ini telah dilansir sejak tahun 2004 oleh LP3ES & Cesda. Banyak pihak pemerhati demokrasi melihat kontigensi ini sebagai ancaman terhadap konsolidasi dan pendalaman demokrasi Indonesia sehingga berbagai forum dan media mengangkat berbagai kritik dan diskusi lanjut atas masalah ini termasuk keinginan untuk mendorong program reformasi partai politik (Kompas, 2 Juni 2003). Ketidakpopuleran partai politik tidak hanya dialami oleh negara demokrasi baru seperti Indonesia dan kawasan Asia Tenggara (Asia Barometer 2004), Negara maju yang lebih jauh dan lebih lama menerapkan demokrasi seperti Belanda, Inggris, Jerman, partai politik juga mengalami masalah serupa. Di Inggris bahkan dari tahun ke tahun tingkat kepercayaan terhadap parpol terus menurun, tahun 2004 hanya 10% responden yang menyatakan percaya terhadap parpol. (Euro Barometer 2005).

³ Studi ini disarikan dari hasil laporan survey LP3ES dan Partnership tentang Potret Tata Kelola Kelembagaan Partai Politik di Indonesia yang disampaikan pada Pertemuan Konsultasi Partai Politik. Yogyakarta, 21 Mei 2008.

⁴ I Ketut Putra Erawan, Riswandha Imawan dkk. "Parpol, Pemilu dan Parlemen" PLOD UGM dan JIP Fisipol UGM 2006.

BENCI TAPI RINDU

Digelanggang politik derap langkah militer selalu mengundang waspada tinggi sebab supremasi sipil atas militer dengan sendirinya akan terancam. Penilaian ini bisa jadi tidak berlebihan bagi sebuah Negara seperti Indonesia yang pernah didominasi oleh politik otoriter yang dilakoni oleh patologi tiga pengawal politik rejim Orde Baru yang dikenal dengan symbol ABG yakni ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) sekarang TNI (Tentara Nasional Indonesia)⁵, Birokrat dan Golkar selama 32 tahun. Pemimpin Orde Baru, Soeharto, memang memberikan peluang besar kepada militer, karena format politik Orde Baru mendayagunakan peran sosial politik militer disemua bidang. Strategi yang digunakan pemerintah Orde Baru untuk menciptakan stabilitas politik adalah pendekatan keamanan dengan orientasi politik negara-kuat (*strong state*).⁶

Bahkan dalam dua pemerintahan pasca Orde Baru,⁷ militer tidak mampu memulihkan citranya dimata publik.⁸ Baru setelah Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri naik kelas menjadi presiden pada pertengahan 2001, bintang TNI

⁵ TNI (Tentara Nasional Indonesia) adalah nama generik bersifat histories, yang digunakan untuk menggantikan nama lama, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sejak dipisahkannya Kepolisian RI (Polri) dari institusi militer.

⁶ Orientasi *strong state* merupakan model politik yang menyatakan bahwa negara memiliki posisi yang lebih kuat daripada masyarakat, sehingga negara menentukan segala kebijakan, sedangkan aspirasi dan partisipasi masyarakat kurang mendapat perhatian. Masyarakat dipaksa menerima saja apa yang sudah ditentukan oleh negara. Akibatnya civil society tidak dapat berkembang. Tentang strong state lihat Harold Crouch "Indonesia". Dalam Zakaria Haji Ahmad & Harold Crouch (ed.). *Military-Civilian Relations in Southeast Asia*, Singapore: Oxford University Press. 1985. Hal 50-77.

⁷ Pemimpin Orde Baru Presiden Soeharto dijatuhkan melalui gerakan reformasi pada tahun 1998 kemudian jabatan Presiden diserahkan kepada wakilnya B.J. Habibie yang hanya berumur 1 tahun. Pemilu demokratis pertama pasca Orba dilangsungkan tahun 1999 dengan terpilihnya Abdulrahman Wahid sebagai presiden yang menjabat hingga tahun 2001. Presiden Abdulrahman Wahid diberhentikan oleh MPR kemudian digantikan oleh Wakilnya Megawati Soekarnoputri yang menjabat dari tahun 2001 hingga 2004.

⁸ Gambaran keterpurukan militer diperlihatkan dalam penelitian *Kompas* tahun 1998 sampai akhir tahun 2001. Rangkaian hasil jajak pendapat terhadap warga kota menunjukkan betapa luruh citra TNI dimata masyarakat kota selama kurang lebih empat tahun. Citra buruk ini tidak lepas dari kiprah militer sepanjang Orde Baru dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan berbangsa . Atas nama pembangunan dan keamanan, pemerintah Orde Baru dan militer berhak melakukan apapun meski nyawa manusia bangsa sendiri sering menjadi taruhnya. Tragedi kemanusiaan akibat operasi militer di berbagai daerah seperti Aceh, Irian Jaya atau Papua, Timor-Timur (sekarang Timor Leste), Lampung, sampai penembakan disertai aksi penculikan aktivis mahasiswa di Jakarta merupakan bukti betapa represif militer waktu itu. Kiprah TNI dalam bidang sosial kemasyarakatan ikut menambah nilai merah institusi ini. Dominasi TNI sejak pemerintahan desa sampai pemerintahan pusat begitu nyata terlihat. Bahkan bidang ekonomi yang jauh dari profesionalisme militer turut dimasukinya. Lihat Tim Litbang Kompas, "Indonesia Dalam Krisis 1997-2002 : Militer di Era Reformasi, Pamornya Sempat Memudar" Penerbit Buku Kompas. 2002.

mulai menanjak naik. Namun, rasa curiga publik terhadap tentara berpolitik ternyata masih tinggi. Bahkan memasuki Pemilu 2004 terdapat perubahan mendasar yang signifikan mempengaruhi jalannya Pemilu yakni diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU. Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pemilu dimana dalam komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tidak akan ada lagi Fraksi TNI/Polri, Utusan Golongan dan Utusan Daerah. Sebagai gantinya, muncul Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR. Artinya dilembaga tertinggi negara itu nantinya hanya akan ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPD, yang semua anggotanya dipilih secara langsung melalui pemilu.

Namun demikian terdapat fenomena politik yang menarik dicermati yakni sekalipun militer sudah tidak memiliki kursi lagi di DPR dan mengalami masa-masa suram pada awal reformasi, tetapi tokoh-tokoh militer masih menjadi daya tarik tersendiri dikalangan politisi partai. Hal ini ditandai kian maraknya usaha parpol merekrut bahkan mengkandidatkan tokoh purnawirawan militer dalam berbagai ajang suksesi. Terkhusus bagi PDI fenomena ini bukanlah hal pertama terjadi. Masuknya 40 purnawirawan militer dari berbagai angkatan dan beragam pangkat pada akhir Mei 1991 ke PDI pimpinan Soerjadi merupakan peristiwa politik yang mengundang tanda tanya paling besar akan langkah-langkah militer di masa Orde Baru.⁹

Di masa reformasi fenomena menguatnya purnawirawan militer masuk partai politik kembali terulang dilihat dari kian banyaknya purnawirawan militer yang mendirikan partai politik maupun bergabung dengan partai politik. Keterlibatan mereka berada baik dalam kepengurusan maupun dalam kandidasi public seperti pada Pilpres dan Pilkada. Pada tahun 1998 paling tidak empat jenderal purnawirawan dan 160 purnawirawan marinir berbondong-bondong bergabung dengan PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarnoputri. Setahun kemudian, menjelang pemilu 1999, lima jenderal purnawirawan menyebar masuk ke lima partai baru. Mantan Panglima ABRI Jenderal Purn. Edi Sudrajat bersama

⁹ Pasalnya, hingga saat itu aspirasi para purnawirawan bisa dikatakan hanya disalurkan melalui Golkar sebab Pepabri, yang disebut-sebut wadah tunggal para purnawirawan merupakan keluarga besar Golkar. Menanggapi anomali ini terekam perbedaan pendapat dalam pemberitaan saat itu antara Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal LB Moerdani dan Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno. Namun itu tidak serta-merta mencerminkan ada perpecahan di tubuh ABRI sebab hubungan pribadi antara Moerdani dan Sutrisno diketahui sangat baik. Lagi pula *esprit de corps* terkenal amat kuat dikalangan militer. Satu-satunya tafsiran yang tinggal dari fenomena yang berlangsung hanya menjelang setahun menjelang pemilu 1992 itu : ada skenario besar yang sedang digarap. Lihat : Tim Litbang Kompas. "Indonesia Dalam Krisis 1997-2002 : Pensiunan Militer Masuk partai Politik" Kompas Media Nusantara. 2002.

mantan fungsionaris Golkar mendeklarasikan PKP. Empat jenderal pensiunan lainnya bergabung dengan PAN, Partai IPKI, Partai Krisna dan Partai MKGR. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2002, hanya dua tahun menjelang pemilu 2004, empat jenderal pensiunan bergabung dengan PPP pimpinan Hamzah Haz yang sedang menjadi wakil Presiden.¹⁰

Untuk lebih lengkapnya lihat tabel berikut :

Purnawirawan Militer yang masuk partai politik

Tahun	Nama	Partai Politik
1977	Brigjen TNI Purn. H. Hassan Basry	PPP
1982	Brigjen TNI Purn. Josef Mthius Miloa	PDI
1986	Brigjen Pol. Purn. K. H. Hasbullah Bakry	PDI
1991	Mayjen TNI Purn. Soedarmo, bersama 40 purnawirawan	PDI
1998	Mayjen TNI Purn. Theo Syafei Mayjen TNI Purn. RK Sembiring Meliala Brigjen TNI Purn. Sunarso Djajusman Brigjen TNI Purn.. Djoko Supriadi, bersama 160 purnawirawan Marinir	PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan
1999	Mayjen TNI Purn. Soewarno Adiwidjojo Mayjen TNI Purn. R. Suprpto Jenderal TNI Purn. Edi Sudrajat Letjen TNI Purn. GH Mantik Jenderal TNI Purn. Rudini	PAN Partai IPKI PKP Krisna MKGR
2002	Letjen TNI Purn. Yunus Yosfiah Letjen TNI Purn. Andi M. Ghalib Mayjen TNI Purn. Amir Syarifuddin Mayjen TNI Purn. Muchlis Anwar Marsda TNI Purn. Gandhi Natasupatma Jenderal TNI Purn. R. Hartono	PPP PPP PPP PPP PPP PKPB

Sumber : Litbang Kompas 2002.

Rekam jejak keterlibatan purnawirawan militer dan polisi dalam kepengurusan partai politik kembali ditelusuri oleh media cetak Kompas yang kemudian diangkat pada harian tersebut pada tanggal 4 agustus 2008 menunjuk beberapa nama berikut ini :

Tahun	Nama	Partai Politik	Jabatan Dalam Parpol atau diluar Parpol
2008	Kombes (Purn) Iyer Sudaryana Kolonel TNI (Purn) Bahar Mallarangan Kolonel TNI (Purn) Tasno HP	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	Ketua Wakil Ketua Ombudsman Nasional Wakil Kepala Badan Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Perikanan Wakil Kepala Badan

¹⁰ Ibid

	Letkol TNI (Purn) Haryanto		Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan
2008	Jenderal TNI (Purn) R. Hartono Mayjen TNI (Purn) Hartarto Mayjen TNI (Purn) H. Namuri Anoem S Brigjen TNI (Purn) H. Suhana Bujana Marsda TNI (Purn) Suharto	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	Ketua Umum Sekretaris Jenderal Ketua Ketua Ketua
2008	Letjen TNI (Purn) Sumarsono	Partai Golkar	Sekretaris Jenderal
2008	Letjen TNI (Purn) Syahrir MS Mayjen TNI Syarnubi Brigjen TNI (Purn) Husein Thaib	Partai Republika Nusantara	Presidium Ketua Ketua
2008	Kombes (Purn) Bambang Sutedjo Letjen TNI (Purn) Sugiono Letjen TNI (Purn) Sanif	Partai Bulan Bintang	Sekretaris Departemen Pertahanan dan Keamanan Anggota Departemen Pertahanan dan Keamanan Anggota Departemen Pertahanan dan Keamanan
2008	Letjen TNI (Purn) Arie Mardjono Laksda TNI (Purn) Abu Hartono Jenderal TNI (Purn) Wiranto Mayjen TNI (Purn) Aqlani Maza Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh Marsdya TNI (Purn) Budhy Santoso Jenderal (Pol) (Purn) Chaeruddin Ismail Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy Jenderal TNI (Purn) Soebagyo HS Mayjen TNI (Purn) Iskandar Ali	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Wakil Ketua Dewan Penasehat Wakil Ketua Dewan Penasehat Ketua Umum Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Wakil Bendahara Umum
2008	Jenderal (Hor) Susilo Bambang Yudhoyono Kolonel (Purn) Hadi Utomo Komjen (Purn) Nurfaizi	Partai Demokrat	Ketua Dewan Pembina Ketua Umum Ketua Bidang Hankam
2008	Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwopradjono	Partai Gerakan	Wakil Ketua Umum

	Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto	Indonesia Raya (Gerindra)	Anggota
2008	Mayjen TNI (Purn) Theo Syafei	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Ketua Bidang Hankam
	Mayjen TNI (Purn) Adang Ruchiyatna		Ketua Bidang Kesra

Sumber : Litbang Kompas, diolah dari susunan pengurus dewan pimpinan pusat parpol yang bersangkutan. Catatan : nama belum seluruh yang ada di parpol. Kompas, 4 Agustus 2008.

Data ini menunjukkan bahwa semenjak reformasi politik menuju demokratisasi bergulir di Indonesia, purnawirawan TNI dan Polri semakin banyak direkrut masuk ke partai politik. Kehadirannya bahkan merambah menjadi elit strategis partai dengan menduduki posisi penting sebagai pengurus harian di internal partai. Fenomena ini semakin menarik untuk ditelusuri karena penguatan purnawirawan militer tidak hanya tampak dari partai-partai baru yang memang didirikan oleh mantan petinggi militer seperti Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) melainkan telah mewabah dikalangan partai-partai yang dipimpin oleh sipil seperti PBB, PPP, PDK dan PDI-P.

KRISIS POLITISI SIPIL

Beragam pendapat mengemuka menanggapi kondisi ini diantaranya pendapat dari kalangan politisi dan pendapat dari kalangan kritis. Bagi kalangan politisi seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum mengatakan : "Kehadiran purnawirawan memperluas basis pengalaman organisasi dan kedisiplinan dalam pengembangan partai. Kehadiran mereka juga menambah variasi kekuatan kader dan variasi latar belakang calon anggota legislatif. Kiprah purnawirawan disejumlah partai adalah bagian dari kebebasan warga sipil karena status mereka sudah menjadi warga sipil. Masuknya purnawirawan ke sejumlah partai termasuk mendirikan partai adalah kewajaran karena terjadi juga di semua negara demokratis".¹¹

Sementara pendapat dari Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon menilai "Tidak perlu ada dikotomi antara sipil dan militer walaupun militer masih menjadi salah satu institusi terbaik membentuk calon pemimpin. Bahkan, sejak masa Orde Baru hingga sekarang, figur berlatar belakang militer masih banyak dilirik partai

¹¹ Kompas, 4 Agustus 2008.

mengingat pengalaman dan kemampuan kebanyakan parpol terkait kaderisasi calon pemimpin masih rendah. Tambah lagi, selama 10 tahun terakhir reformasi berjalan, rakyat melihat banyak hal belum berhasil dicapai seperti terkait kesejahteraan dan ekonomi, sehingga memunculkan kerinduan hadirnya kembali kepemimpinan yang lebih tegas dan berwibawa”¹²

Tentu pendapat yang berlawanan akan muncul dari kelompok akademisi. Meskipun belum jelas terlihat sejauhmana resultante politik masuknya para pensiunan militer ke berbagai partai politik terhadap masa depan supremasi sipil di Indonesia. Pengamat politik Prof. Dr. R. William Liddle dari Ohio State University pada februari 2001 sudah mengingatkan bahwa masa depan hubungan sipil-militer di Indonesia yang berarti juga masa depan demokrasi, sangat mengkhawatirkan. Alasannya para pemimpin sipil, terlebih-lebih Megawati Soekarnoputri dan pemimpin lain PDI Perjuangan, belum mengerti pertanggungjawaban mereka untuk menegakkan supremasi sipil di awal masa transisi.¹³

Kealpaan ini, menurut Liddle, bisa memberi peluang kepada tentara untuk kembali lagi berkuasa dalam waktu yang tidak terlalu lama. ”Tentara kembali mungkin bukan sebagai penguasa tunggal, melainkan sebagai *power behind the throne*”, kekuatan di belakang singgasana, yang tidak kurang berbahaya bagi kelestarian demokrasi,” katanya waktu itu.¹⁴

Pada tataran ini menarik untuk ditelusuri pertimbangan-pertimbangan politis yang melatarbelakangi ketertarikan partai politik merekrut purnawirawan militer dalam kepengurusan dan kandidasi publik partai. Sejauh penelusuran yang berkembang sejumlah alasan yang marak diperbincangkan adalah: **pertama**; Krisis kader. Meskipun demokratisasi pasca Orde Baru telah memberi peluang yang sangat luas kepada kelompok sipil untuk terlibat dalam politik dan suksesi, kenyataannya sipil belum siap sepenuhnya. Partai politik sebagai basis pengkaderan pemimpin sipil justru gemar dan masih menggunakan cara-cara militer untuk mengkader calon pemimpinnya. ”Sipil masih merasa inferior (rendah

¹² Ibid.

¹³ Tim Litbang Kompas. “Indonesia Dalam Krisis 1997-2002 : Pensiunan Militer Masuk partai Politik” Kompas Media Nusantara. 2002.

¹⁴ Ibid

diri) terhadap militer” kata Peneliti Senior Center for Strategic and International Studies (CSIS) J. Kritiadi.¹⁵

Menurutnya kondisi ini terjadi karena masih kuatnya budaya patriarkhi masyarakat dan keterlambatan parpol dalam mengkader calon-calon pemimpin sipil. Pelatihan fisik bagi para kader parpol justru lebih dikedepankan dibandingkan kemampuan berdebat, berdiskusi, serta menerjemahkan visi dan misi partai dalam membuat kebijakan alternatif. Kritiadi mengakui sistem pengkaderan dan pencetakan pemimpin dalam militer saat ini memang lebih baik dibandingkan yang dilakukan kelompok sipil.¹⁶

Partai politik menjadikan purnawirawan sebagai kader bahkan menjadi calon pemimpin nasional karena kaderisasi dilingkungan parpol masih lemah. Bukti lemahnya kaderisasi itu adalah parpol membuka lowongan kepada publik untuk menjadi calon anggota legislatif. ”untuk mendapatkan kader yang sudah jadi, paling mudah parpol merekrut purnawirawan TNI/Polri, apalagi masih ada persepsi dari masyarakat kita bahwa purnawirawan itu bisa bersikap tegas dibandingkan dengan sipil” kata pengamat politik dari universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Andreas Pandiangan.¹⁷ Dalam politik keseharian politisi sipil acapkali mendemonstrasikan kepada publik aneka kegobrokan berupa konflik kepentingan dan kekuasaan, korupsi, sengketa suksesi dan sebagainya. Bahkan acapkali terjadi perlombaan kekuasaan berujung tindakan anarkhis dari para simpatisan parpol. Kuncinya pada kekuatan mobilisasi massa. Kekuatan ini mengubah demokrasi menjadi mobokrasi.¹⁸

Kedua; Jaringan Politik. Sebagai bekas petinggi militer tentunya telah banyak berinteraksi dengan berbagai lingkaran strategis elit dari berbagai kalangan. Purnawirawan militer merupakan autobiografi nasionalis yang melekat kuat sebagai hasil didikan profesinya, predikat ini berpengaruh terhadap praktek-praktek interaksi sosial mereka yang tidak terikat secara ekstrim pada ikatan-ikatan perbedaan ideologi dan kelompok tertentu.

¹⁵ Kompas, 12 September 2008. Pemimpin Nasional : Sipil masih merasa inferior terhadap militer. Analisa ini diangkat dari hasil survey Pride Indonesia tentang Peluang Tokoh Latar Belakang Militer dalam Kancah Politik Nasional.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Kompas 4 Agustus 2008.

¹⁸ Partai politik sebagai penggerak politik ditingkat nasional dan lokal sering kali menggunakan mobokrasi (mobilisasi massa) sebagai instrument untuk meraih kepentingan-kepentingannya. Karenanya demokrasi yang dikendalikan oleh politik mobokrasi parpol ini mudah tergelincir kedalam konflik dan pada puncaknya menghasilkan kerusuhan dan pertikaian. Jelasnya lihat : Riswandha Imawan, I Ketut Putra Erawan Dkk, ”Parpol, Pemilu dan Parlemen : Agenda-agenda penguatan Parpol” PLOD & JIP UGM 2006.

Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Totok Sarsito, menuturkan banyaknya parpol menggaet purnawirawan sebagai pengurus, calon pemimpin atau calon kepala daerah karena purnawirawan memiliki dana dan jaringan yang luas. Purnawirawan dianggap memiliki pengalaman dalam memimpin dan berpengaruh terhadap kelompok tertentu sehingga disukai parpol "selain memiliki pengaruh terhadap prajuritnya semasa ia menjabat, purnawirawan juga dianggap memiliki jaringan luas terhadap berbagai kalangan sedangkan tokoh partai cenderung mengutamakan kepentingan golongannya sehingga cenderung kurang disukai rakyat saat dimunculkan sebagai calon pemimpin."¹⁹

Ketiga; Kemampuan Finansial. Menguatnya pengaruh keberadaan kalangan pengusaha, aktris, Jenderal Purnawirawan militer dalam tubuh parpol dikarenakan mereka memiliki kemampuan finansial yang besar dan pada saat yang sama partai politik belum memiliki sumber pembiayaan berbasis konstituen disertai tata kelola keuangan parpol yang belum profesional. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan aktivitas partai dan lebih jauh berpengaruh terhadap independensi partai.

"I had a hungry party behind me" kata Grover Cleveland, setengah putus asa tatkala dia diminta menghidupi partainya semasa menjabat sebagai Presiden USA (Geddes, 1994). Sangat mungkin sindrom ini akibat dari kesalahan sejak lahir, yakni parpol dikonsepsikan sebagai instrumen merebut kekuasaan demi penjajah. Ketika berhasil direbut, maka sulit mencegah sikap rebutan kekuasaan diantara mereka.²⁰

Struktur pembiayaan partai politik yang didasarkan pada pragmatisme penetapan dan perjuangan agenda telah memberikan jalan bagi intervensi modal ke partai politik. Diakui atau tidak, intervensi modal ke partai politik merupakan salah satu problema krusial dalam reformasi partai politik di Indonesia. Untuk menjalankan berbagai agendanya, partai politik pada umumnya tidak memiliki basis pembiayaan yang memadai. Ketergantungan pada elit-elit partai tertentu merupakan gejala yang dapat ditemui dengan mudah. Partai politik sangat jarang mendapatkan dukungan pembiayaan dari simpatisannya.

¹⁹ Kompas 4 agustus 2008.

²⁰ Riswandha Imawan "Partai Politik di Indonesia : Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri" Working Paper Edisi No.1 Pascasarjana Program Ilmu Politik UGM & Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM. Yogyakarta. 2007.

DETERRENT POWER MILITER

Kekuatan pengetar (*Deterrent Power*) tokoh militer yang memberi daya tarik istimewa bagi para politisi sipil atau anti Orde Baru terletak pada modalitas politik yang dimiliki para tokoh tersebut. Modalitas ini bagaikan air di gurun pasir. Sulit untuk mendapatkannya dalam waktu yang sangat singkat kecuali dengan membayar harga yang mahal baik itu pengorbanan idealisme, pandangan dunia politik hingga insentif dana segar. Modalitas politik tersebut meliputi :

DISIPLIN ORGANISASIONAL

Dalam aspek kultur keorganisasian militer maka ciri pokok yang selalu diperankan tokoh-tokoh militer adalah kedisiplinan. Kedisiplinan organisasional ini melingkupi kedisiplinan dalam merencanakan, memobilisasi dan menggunakan sumber daya untuk kepentingan negara. Disiplin organisasional militer ini menurut Hasnan Habib menyatakan organisasi militer sebagai *raison d'etre* untuk menghadapi dan mengatasi keadaan darurat (*emergency organization*)²¹ yang bercirikan organisasi keras, ketat, hierarkhis, berdisiplin keras, dan bergerak atas komando.

Kepemimpinan yang efektif ini akan mempercepat ayunan politik partai mengikuti eskalasi metode demokrasi bekerja pada setiap suksesi politik lokal. Sejauh keefektifan tersebut tidak mengarah pada amputasi politik, penyederhanaan masalah, otoritarianisme elit dan sentralisme organisasi melainkan digunakan untuk menyeimbangkan konflik kepentingan di dalam dan diluar partai.

Yang menarik bahwa kedisiplinan ini telah bergerak dari kemampuan personal menjadi kultur institusi. Kemampuan seorang elit politik mengelola partai dengan merevitalisasi kultur partai sangat ditentukan oleh komitmen dan kemampuan elit dalam bekerja. Karena itu, elit masih menjadi isu sentral dalam memotret sebab akibat terjadinya perubahan karakter partai. Hal ini juga menunjukkan bahwa sandaran organisasi modern yang menitikberatkan pada peran institusi, regulasi dan otoritas ternyata hanya akan efektif dan fungsional

²¹ Yang dimaksud dengan *emergency organization* adalah sebagai alat/kekautan pertahanan keamanan untuk menghadapi, mengendalikan dan mengatasi keadaan gawat yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan bersenjata dan pihak-pihak lain yang mengancam Negara, kedaulatan, integrasi wilayah dan nilai-nilai hidup bangsa. Sedangkan habit formation dimaksudkan untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang mutlak perlu agar tugas dapat terlaksana dalam keadaan bagaimanapun. Lihat Hasnan Habib, *ABRI dan Demokratisasi Politik*, dalam Selamat Ginting, dkk., eds., *ABRI dan Demokratisasi Politik*, Bandung. Mizan, 1997, hal. 20-31.

ketika organisasi mampu menemukan elit politik yang memiliki komitmen dan kemampuan mengaktivasi diri dan sumber daya partai kearah tersebut.

JARINGAN TERITORIAL

Keberadaan Komando Teritorial ABRI pada masa sekarang ini telah muncul dengan wajah yang jauh berbeda dibanding pada masa Orde Baru.²² Seiring dengan reformasi dan demokratisasi politik lembaga ini telah mengalami perombakan radikal menuju fungsi azasnya sebagai komponen pertahanan.²³ Upaya untuk menemukan wajah baru repolitisasi jaringan teritorial di level lokal untuk tujuan politik semakin kabur.

Tokoh militer mampu memobilisasi jejaring politik di masyarakat bukan karena faktor kebangsawannya semata tetapi ada operasionalisasi kepentingan yang lebih kongkret antar pihak sehingga memudahkan kepatuhan itu bekerja. Operasionalisasi kepentingan ini berbentuk kemampuan memadukan antara pendekatan prestise sosial sebagai bangsawan dan jenderal dengan transaksi kepentingan antar pihak.

Sebuah identitas dan status sosial dalam masyarakat tidak akan dianggap berharga ketika tidak memberi keuntungan materil kepada masyarakat. Karena itu, kebangsawanan dan kemiliteran hanya mampu digunakan memobilisasi jaringan dan massa akan tetapi belum tentu menjamin terbentuknya loyalitas politik ketika tidak disertai transaksi materil, transaksi jasa sosial masa lalu.

POLITIK KEKERASAN

Praktek politik kekerasan Rejim Orba semakin mendalam merusak sendi-sendi sosial rakyat hingga banyak pihak di militer merasa telah berada dalam

²² Menurut Salim Said: aparat teritorial pada Orde Baru digunakan atau disalahgunakan untuk tujuan-tujuan politik penguasa dengan mengangkat Panglima Kodam menjadi aparat pelaksana Kopkamtib dan pembina Golkar. Kedudukan sebagai Pelaksana Khusus (Laksus) Kopkamtib inilah terutama yang menjauhkan rakyat dari aparat teritorial tersebut, karena pada akhirnya aparat teritorial menjadi alat untuk menggiring dan mengontrol rakyat bagi suksesnya program politik dan ekonomi penguasa. Lihat: Salim Said. *Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2001. hal. 310.

²³ Abdoel Fattah mengutip pendapat Letjen TNI Agus Widjojo, semasa menjabat Kepala Staf Teritorial TNI, menyatakan: Pembinaan potensi di daerah untuk mendukung kepentingan nasional, sebenarnya adalah fungsi pemerintah yang mempunyai kewenangan menjangkau ke masyarakat sipil, dan potensi nasional yang berstatus sipil. Itu nanti tidak akan dimiliki lagi oleh komando teritorial. Komando teritorial nanti hanya akan melaksanakan tugas-tugas fungsi pertahanan, untuk melatih dan menyiapkan satuan-satuan di daerahnya, menyiapkan rencana pertahanan di daerahnya, dan bertindak sebagai pelatih rakyat. Lihat: Abdoel Fattah. *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. Yogyakarta: LkiS. 2005. hal. 235.

posisi dilematis.²⁴ Memasuki era reformasi maka tabiat ini secara massif menjadi serangan telak dari kalangan aktivis gerakan prodemokrasi agar secepatnya ditiadakan.

Sejarah Parpol juga menunjukkan bahwa hampir setiap konflik internal partai yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan kekerasan tidak mampu mensolidkan partai. Sisi negatifnya adalah setiap konflik akan menciptakan budaya kekerasan dalam menyelesaikan masalah partai. Kedepan pembiaran atas gejala ini akan membuat partai semakin kesulitan memulai melembagakan aturan main dan mengalami kegagalan menjadi miniatur pendidikan demokrasi bagi para kadernya.

Hal ini senada dengan teoritisasi yang dikembangkan oleh Dom Helder Camara yang terkenal dengan postulatnya "Kekerasan hanya akan menghasilkan kekerasan baru". Kekerasan dalam bentuk personal dapat ditularkan ke orang lain hingga menjadi kebencian komunal dan ketika konflik semakin tidak terkendali maka tiap pihak memanfaatkan otoritas organisasi atau negara untuk melakukan kekerasan resmi maka terbentuklah spiral kekerasan.²⁵

MEMBACA HASIL PEPERANGAN

Elaborasi pendapat berbagai kalangan yang menganalisa alasan-alasan rekrutmen purnawirawan militer ke partai politik didominasi oleh pertimbangan-pertimbangan pragmatis. Partai politik berupaya mendapatkan kader dan modalitas financial yang instan bukan dari hasil pengkaderan dan pengelolaan modalitas konstituen yang seharusnya bertindak sebagai urat nadi keberlanjutan partai politik. Menarik untuk dicermati partai-partai yang banyak merekrut mantan militer, hal ini terkait motif-motif yang paling kuat menjadi *driving force* (mesin penggerak) melatarbelakangi rekrutmen tersebut dan seberapa kohesif dan fungsional motif rekrutmen tersebut mendinamisasi partai kearah pengelolaan kader dan kandidasi publik yang lebih profesional dan modern.

Menurut Direktur Eksekutif Soegeng Soeryadi Syndicate, Sukardi Rinakit kegagalan partai politik mengemban fungsi sebagai penyalur aspirasi publik

²⁴ABRI disebut sebagai tulang punggung Negara yang bertugas menciptakan rasa aman dalam masyarakat, dalam banyak kasus justru dianggap sebagai penyebab ketidakamanan itu sendiri atau dianggap memusuhi rakyat. ABRI kesulitan membedakan dirinya apakah benar-benar menjalankan fungsinya dalam konteks pertahanan keamanan dan ketertiban atukah sebenarnya hanya diperalat oleh kelompok tertentu. Bahkan orang tertentu, sebagai tukang pukulnya. Lihat Romura R. Simbolon. *Ancaman Disintegrasi Bangsa: Indonesia Baru dan Tantangan TNI, Pemikiran Masa Depan*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. 1999. hal. 95.

²⁵ Camara, Helder, Dom Helder Camara. *Spiral Kekerasan*, Yogyakarta, Resist Book. 2005, hal. ix

terjadi akibat partai politik dikuasai oleh kekuatan saudagar, jawara dan preman serta aristokrat. "lemahnya kaderisasi pemimpin dan besarnya kebutuhan dana untuk menggerakkan mesin partai membuat partai merekrut mereka sebagai pengurus meskipun tidak memiliki kemampuan politik."²⁶

Kondisi ini mendorong persoalan nilai dan substansi kepentingan publik secara terus-menerus ditekan untuk tujuan mencapai efisiensi, efektifitas dan pragmatisme politik yang semakin dikedepankan oleh partai politik. Modernisasi, rasionalisasi ekonomi dan birokrasi di sisi lain juga telah menciptakan struktur kerangkeng dimana masyarakat terpenjara didalamnya dan tidak memiliki pilihan kecuali menjalankan prosedur-prosedur yang telah dibakukan. Ironisnya ketika segala hal dalam sektor publik dirancang agar pemerintah dapat menjalankan secara efektif, persoalan yang paling menonjol sekarang ini justru ketidakefektifan. Peranan politik direduksi menjadi manajemen domain publik yang justru semakin dipengaruhi (dipaksa) untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai ekonomi pasar.²⁷

Partai dituntut mampu mengembangkan ikatan yang tidak sebatas simbol dan pragmatisme politik yang sifatnya artificial melainkan dituntut pula mendorong penjabaran-penjabaran populer dan populis demi mempertahankan konstituen bahkan menjangkau basis konstituen lain yang sebelumnya tidak memiliki akar historis dan keterikatan ideologi dengan partai. Ikatan baru itu dapat diserap oleh publik tidak dapat diraih dengan hanya mengandalkan jaringan dan kemampuan finansial untuk operasionalisasi politik. Lebih dari itu kader dan kandidat partai politik juga seharusnya memiliki kemampuan elaborasi programatik atas ideologi, visi dan misi partai. Yaitu kader partai yang giat merancang program, analisa masalah publik, berdebat, sikap dan kebijakan dalam pemerintahan. Kepatuhan dan simpati publik pada ranah ini akan mendorong efek konstruktif pada pengelolaan partai politik yang lebih modern.

²⁶ Kompas, Rabu 30 april 2008. : Saudagar-Jawara Kuasai Parpol : Banyak Pejabat Tidak Negarawan.

²⁷ Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul "Teori-Teori Mutakhir Partai Politik" Tiara Wacana Yogya 1988.
- Crouch, Harold "Indonesia". Dalam Zakaria Haji Ahmad & Harold Crouch (ed.). *Military-Civilian Relations in Southeast Asia*, Singapore: Oxford University Press. 1985.
- Camara, Dom Helder. *Spiral Kekerasan*, Yogyakarta, Resist Book. 2005.
- Erawan, I Ketut Putra Riswandha Imawan dkk. "Parpol, Pemilu dan Parlemen" PLOD UGM dan JIP Fisipol UGM 2006.
- Fattah, Abdoel. *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. Yogyakarta: LkiS. 2005.
- Habib, Hasnan "ABRI dan Demokratisasi Politik", dalam Selamat Ginting, dkk., eds., *ABRI dan Demokratisasi Politik*, Bandung. Mizan, 1997.
- Imawan, Riswandha. I Ketut Putra Erawan Dkk, "Parpol, Pemilu dan Parlemen : Agenda-agenda penguatan Parpol" PLOD & JIP UGM 2006.
- Imawan, Riswandha "Partai Politik di Indonesia : Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri" Working Paper Edisi No.1 Pascasarjana Program Ilmu Politik UGM & Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM. Yogyakarta. 2007.
- Said, Salim. *Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2001.
- Simbolon, Romura R. *Ancaman Disintegrasi Bangsa: Indonesia Baru dan Tantangan TNI, Pemikiran Masa Depan*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. 1999.
- Tim Litbang Kompas, "Indonesia Dalam Krisis 1997-2002 : Militer di Era Reformasi, Pamornya Sempat Memudar" Penerbit Buku Kompas. 2002.

Laporan survey LP3ES dan Partnership tentang Potret Tata Kelola Kelembagaan Partai Politik di Indonesia yang disampaikan pada Pertemuan Konsultasi Partai Politik. Yogyakarta, 21 Mei 2008.

Media Cetak :

Kompas, Rabu 30 april 2008. : Saudagar-Jawara Kuasai Parpol : Banyak Pejabat Tidak Negarawan.

Kompas, 2 Juni 2003.

Kompas, 4 Agustus 2008.

Kompas, 12 September 2008. Pemimpin Nasional : Sipil masih merasa inferior terhadap militer.